



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN DAN INVESTASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG**

Tahun Sidang	:	2014
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	4 (empat)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 6 November 2014
W a k t u	:	Pukul 11.30 s.d13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN), didampingi: 1. Heri Gunawan (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PGERINDRA) 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD)
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Menerima Audiensi/RDPU dengan Karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Hadir	:	3 orang Pimpinan Komisi VI DPR-RI 1 orang Anggota Komisi VI DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. Audiensi/RDPU Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 11.30 WIB, dan telah dihadiri 4 (empat) Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Audiensi/RDPU hari ini, Kamis, 6 November 2014 dalam rangka menerima Karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero).
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Ketua Serikat Karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk menyampaikan aspirasinya mengenai Restrukturisasi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan tuntutan pembayaran hak-hak normatif karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang belum dibayarkan.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman terhadap aspirasi yang disampaikan Karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero).

II. TUNTUTAN AKSI DAMAI KARYAWAN PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)

1. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus segera membayar Hak-hak normatif (Gaji, Uang Makan Transport Lembur dan Tunjangan Hari Raya) Karyawan Aktif PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) selama 12 (dua belas) bulan lebih dan Hak-hak Normatif Pensiunan (Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak) Pensiunan Karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) dalam waktu yang sesegera mungkin, sesuai dengan Rekomendasi Panja Merpati Nusantara Airlines (Persero), Komisi VI DPR RI tanggal 2 Juli 2014.
2. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus segera mempercepat Program Restrukturisasi dan Revitalisasi PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) dapat kembali beroperasi dan terbang wilayah-wilayah terpencil dan pendalaman NKRI dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat di daerah terpencil dan pendalaman NKRI.
3. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus segera menentukan nasib masa depan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan Karyawannya, apakah tetap menjadi karyawan PT, Merpati yang harus dibayarkan Hak-hak normatifnya sebagai karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) atau karyawan yang di PHK dengan diberikan Pesangon yang layak ditambah Kompensasi Kerugian (Denda) selama 12 Bulan Lebih tidak digaji.

III. KESIMPULAN

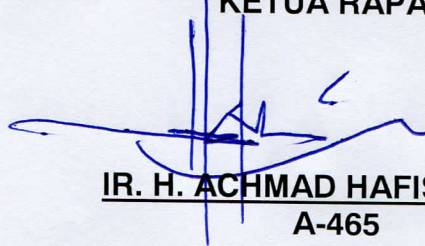
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Ketua Serikat Karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk menyampaikan secara tertulis mengenai aspirasi yang disampaikan terkait dengan Restrukturisasi PT. Merpati Nusantara Merpati Airlines (Persero).
2. Komisi VI DPR RI menerima aspirasi karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) mengenai tuntutan pembayaran hak-hak normatif karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero).

3. Komisi VI DPR RI akan segera mengirimkan surat melalui Pimpinan DPR RI untuk mendesak kepada Pemerintah c.q. Menteri BUMN RI dan Menteri Keuangan RI agar segera menyelesaikan pembayaran hak-hak normatif karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) sesuai Rekomendasi Panja Merpati Nusantara Airlines (Persero) Komisi VI DPR RI tanggal 2 Juli 2014.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



IR. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR
A-465